



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri sipil dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan disiplin kerja untuk membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah mewujudkan tujuan pembangunan;
 - b. bahwa tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2020 dapat mendorong kinerja pelayanan dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu diberikan dengan menentukan kriteria dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) juncto ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah yang menjadi pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negera Daerah belum ditetapkan maka Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buol kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Buol yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin, meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan aparatur, serta meningkatkan kesejahteraan.
2. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Besaran TPP adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan yang ditetapkan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria sebelum dikurangi dengan hasil produktivitas kerja, tingkat kehadiran dan/atau hukuman disiplin, termasuk pajak penghasilan.

3. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil produktivitas kerja yang selanjutnya disebut TPP produktivitas kerja adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yakni 60% (enam puluh perseratus) dari besaran TPP.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil disiplin kerja yang selanjutnya disebut TPP disiplin kerja adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yakni 40% (empat puluh perseratus) dari Besaran TPP.
5. Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan yang selanjutnya disebut Pegawai Yang Dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar Instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi induknya.
6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Hukuman disiplin adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Hari Kerja adalah hari yang digunakan PNS untuk bekerja selama 5 (lima) hari kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Jumat atau selama 6 (enam) hari kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Sabtu yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Buol untuk waktu 37.50 (tiga puluh tujuh koma lima puluh) jam per minggu.
12. Cuti Besar adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
13. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
14. Cuti karena alasan penting adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang karena ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, atau PNS yang bersangkutan melangsungkan perkawinan pertama atau karena alasan lainnya untuk jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Cuti Tahunan adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Hari Kerja.

16. Cuti Melahirkan adalah kondisi PNS wanita yang tidak masuk kerja karena persalinan yang pertama, kedua dan persalinan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
17. Cuti Bersama adalah hari yang dinyatakan untuk tidak masuk kerja secara Nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan atau surat edaran Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
18. Apel pagi adalah apel yang dilakukan di halaman kantor atau tempat lain yang ditentukan pada hari kerja Senin sampai hari Kamis.
19. Kabupaten adalah Kabupaten Buol.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
22. Bupati adalah Bupati Buol.
23. Bagian adalah Bagian lingkup Sekretariat Daerah.
24. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Daerah.
25. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Provinsi.
26. Rumah Sakit adalah Rumah Umum Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB II KRITERIA

Pasal 2

TPP Tahun 2020 diberikan kepada:

- a. PNS; dan
- b. Pegawai yang Dipekerjakan yang memenuhi syarat.

Pasal 3

TPP diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja;
- c. kelangkaan profesi;
- d. prestasi kerja; dan
- e. tempat bertugas.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling rendah 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi berupa resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural di bawahnya.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini bersifat khusus; atau
 - b. kualifikasi PNS Pemerintah Daerah tidak ada atau sangat terbatas yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran *basic* TPP.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran *basic* TPP.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi.
- (2) Besaran TPP berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.

Pasal 9

- (1) Syarat Pegawai Yang Dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. apabila yang bersangkutan telah diangkat dalam Jabatan Struktural sepanjang tidak memperoleh tunjangan penghasilan atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi asalnya; atau
 - b. tidak menduduki Jabatan Struktural dengan ketentuan:
 1. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 2. tidak memperoleh tunjangan penghasilan, tunjangan kinerja atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi asalnya.
- (2) Jatuh tempo pemberian TPP bagi Pegawai Yang Dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 terhitung sejak bulan Januari Tahun berikutnya.

Pasal 10

TPP tidak diberikan kepada PNS:

- a. berstatus sebagai CPNS;
- b. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
- c. PNS Daerah lain/Instansi Vertikal yang berstatus pegawai titipan;
- d. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwenang karena melakukan tindak pidana;
- e. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- f. sedang menjalani tugas belajar;
- g. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- h. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- i. guru dan pengawas sekolah; atau
- j. secara nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu berdasarkan pernyataan dari atasan langsung.

Pasal 11

- (1) PNS Pindahan dari Provinsi Lain atau Kabupaten/Kota diberikan TPP apabila:
 - a. gaji PNS yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah mengacu pada tahun pindah.
- (2) Jatuh tempo pemberian TPP bagi PNS Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni bulan Januari Tahun berikutnya.

BAB III BESARAN DAN PERUBAHAN NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 12

- (1) Besaran TPP dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Perhitungan besaran TPP berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut:

besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kali indeks kapasitas fiskal daerah kali Indeks Kemahalan Konstruksi kali Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran TPP tertinggi Per Kelas Jabatan.

Pasal 13

- (1) Besaran TPP menurut Kelas Jabatan mempertimbangkan Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran TPP menurut kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Perubahan besaran TPP setiap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dalam tahun berkenaan hanya berlaku bagi:

- a. PNS yang memperoleh promosi dalam Jabatan Struktural; dan
- b. Pegawai Yang Dipekerjakan yang mendapat promosi dalam Jabatan Struktural.

Pasal 15

Dalam hal terjadi mutasi PNS antar Perangkat Daerah dalam tahun berjalan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah asal;
- b. penilaian pemberian TPP pada Perangkat Daerah yang baru; dan
- c. perubahan anggaran dan besaran TPP yang bersangkutan pada Perangkat Daerah yang baru dapat dilakukan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PENILAIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Penilaian pemberian TPP terdiri atas:

- a. produktivitas kerja; dan
- b. disiplin kerja.

Pasal 17

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Besaran TPP.
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari besaran TPP.

Bagian Kedua Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 18

- (1) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas jabatan/kinerja.
- (2) Setiap PNS wajib membuat laporan produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara manual setiap hari kinerja.
- (4) Laporan produktivitas kerja dinilai oleh atasan langsung secara berjenjang sebagai berikut :
 - a. pejabat pelaksana dinilai oleh pejabat pengawas (eselon IV);
 - b. pejabat pengawas (eselon IV) dinilai oleh pejabat administrator (eselon III);
 - c. pejabat administrator (eselon III) dinilai oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. kepala UPT dinilai oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - e. untuk rumah sakit Daerah berlaku ketentuan:
 - 1) Pejabat pengawas (eselon IV) dinilai oleh pejabat administrator (eselon III.B).
 - 2) Pejabat administrator (eselon III.B) dinilai oleh Direktur.
 - 3) Direktur dinilai oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
 - f. Kepala Bagian Sekretariat Daerah dinilai oleh Asisten;
 - g. Asisten/Kepala Perangkat Daerah dinilai oleh Sekretaris Daerah; dan
 - h. Laporan Sekretaris Daerah dinilai secara *self assessment*.

Pasal 19

- (1) Perhitungan nilai indikator aspek produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai berikut:
 - a. nilai 75 sampai dengan 100 diberi pemotongan TPP sebesar 0,0% (nol koma nol persen);
 - b. nilai 50 sampai dengan 74 diberi pemotongan TPP sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen);
 - c. nilai 26 sampai dengan 49 diberi pemotongan TPP sebesar 1,1% (satu koma satu persen); dan
 - d. nilai kurang atau sama dengan 24 diberi pemotongan TPP sebesar 1,6% (satu koma enam persen).
- (2) Nilai produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai laporan harian produktivitas kerja yang memuat:
 - a. pelaksanaan tugas dan/atau fungsi sesuai jenjang jabatan;
 - b. pelaksanaan tugas fungsional sesuai jabatan yang diberikan; dan/atau
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Pejabat Penilai wajib menilai secara obyektif dan bertanggung jawab setiap prestasi kerja PNS.

- (4) PNS yang tidak masuk kerja atau secara nyata tidak melaksanakan tugas diberikan nilai produktivitas kerja sebesar 0%.
- (5) PNS yang melaksanakan tugas dinas luar diberikan nilai TPP produktivitas kerja sebesar 100%.
- (6) Capaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan berkenaan dinilai oleh atasan langsung setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya.
- (7) Format laporan dan penilaian produktivitas kerja tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 20

Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS meliputi:

- a. tidak masuk bekerja;
- b. tidak apel pagi;
- c. pulang sebelum waktunya;
- d. Tidak mengikuti upacara hari-hari besar;
- e. Tidak mengikuti kegiatan keagamaan dan kegiatan pemerintahan lainnya; dan
- f. Ketidakpatuhan membuat laporan harta kekayaan penyelenggara Negara, ketidakpatuhan terhadap Tuntutan Ganti Rugi Daerah dan Pengembalian Aset Daerah.

Pasal 21

- (1) Tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan kondisi PNS yang secara nyata tidak hadir tanpa alasan/keterangan yang sah.
- (2) Alasan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjalankan tugas dinas luar yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari pimpinan;
 - b. sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sakit;
 - c. cuti tahunan;
 - d. cuti melahirkan; dan
 - e. cuti karena alasan penting.
- (3) PNS Tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan sebesar 2,4% per hari dari nilai TPP disiplin kerja.
- (4) Tidak masuk kerja karena alasan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e tidak dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja dan nilai TPP produktivitas kerja.
- (5) Tidak masuk kerja karena tugas dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan nilai TPP disiplin kerja dan nilai TPP produktivitas kerja.

Pasal 22

Tidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 1% (satu persen) dari nilai TPP disiplin kerja.

Pasal 23

PNS pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dikenakan pemotongan TPP sebesar 1,1% (satu koma satu persen) dari nilai TPP disiplin kerja.

Pasal 24

PNS yang tidak mengikuti setiap kegiatan upacara nasional/daerah, kegiatan pemerintahan dan kegiatan hari besar agama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf d dan huruf e dikenakan pemotongan sebesar 2,4% (dua koma empat persen).

Bagian Keempat Hukuman Disiplin dan Menambah Hari Cuti Bersama

Pasal 25

Selain pengurangan TPP disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, pengurangan TPP disiplin kerja juga dilakukan karena alasan:

- a. hukuman disiplin; dan
- b. menambah hari Cuti Bersama.

Pasal 26

(1) PNS yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dikenakan pengurangan terhadap Besaran TPP sebagai berikut:

- a. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Ringan:
 1. teguran lisan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan;
 2. teguran tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 4 (empat) bulan;
- b. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Sedang:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 5 (lima) bulan;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan; dan

3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 7 (tujuh) bulan.
- c. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Berat:
1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 8 (delapan) bulan;
 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebesar 40% (tiga puluh perseratus) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 3. pembebasan dari jabatan sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Pengurangan terhadap Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhitung sejak bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.

Pasal 27

Setiap PNS yang menambah hari Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dikenakan pengurangan Besaran TPP sebesar 20% (dua puluh persen) per hari kerja.

BAB V CARA MENGHITUNG NILAI

Pasal 28

Perhitungan besaran nilai TPP yang diterima merupakan nilai bersih sebelum pajak yang diterima setiap PNS sebagai hasil perhitungan nilai TPP setelah dikurangi dengan:

- a. pemotongan produktivitas kerja;
- b. pemotongan disiplin kerja;
- c. pemotongan hukuman disiplin.
- d. pemotongan menambah hari cuti bersama.

Pasal 29

- (3) Nilai pengurang disiplin kerja diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pemotongan dengan besaran nilai TPP.
- (4) Nilai pengurang produktivitas kerja diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pemotongan dengan besaran nilai TPP.

Pasal 30

- (1) Nilai pengurang hukuman disiplin diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pemotongan dengan besaran TPP.
- (2) Nilai pengurang menambah cuti bersama diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pemotongan dengan besaran TPP.

Pasal 31

Jumlah pemotongan TPP paling tinggi 100% (seratus persen).

Pasal 32

Rumus perhitungan pemotongan besaran TPP yang diterima PNS sebelum pajak sebagai berikut:

Jumlah TPP diterima sama dengan total bobot kriteria TPP dikalikan besaran TPP dibagi 100% (seratus persen)

BAB VI

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 33

- (1) Hari kerja PNS yakni hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Hari kerja PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum yakni Hari Senin sampai dengan Hari Sabtu.

Pasal 34

- (1) Jam kerja PNS, berlaku sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis jam 07.30 sampai dengan jam 16.00; dan
 - b. Hari Jumat jam 07.00 sampai dengan jam 16.00.
- (2) Jam istirahat PNS, berlaku sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis jam 12.00 sampai dengan jam 13.00; dan
 - b. Hari Jumat jam 11.30 sampai dengan jam 13.00.
- (3) Jam kerja PNS pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah mengacu pada jumlah jam kerja per minggu.

Pasal 35

- (1) Setiap PNS wajib menandatangani daftar hadir atau melakukan rekam kehadiran secara elektronik 2 (dua) kali setiap Hari Kerja.
- (2) Format daftar hadir secara manual tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual, selain bulan Puasa sebagai berikut:
 - a. Hari Senin yaitu:
 1. pagi jam 07.30 sampai dengan jam 08.00; dan
 2. sore jam 16.00 sampai dengan jam 16.30;
 - b. Hari Selasa sampai dengan Hari Kamis yaitu:
 1. pagi jam 07.30 sampai dengan jam 07.45; dan
 2. sore jam 16.00 sampai dengan jam 16.30;

- c. Hari Jumat yaitu:
 - 1. pagi jam 07.00 sampai dengan jam 07.30;
 - 2. sore jam 16.00 sampai dengan jam 16.30; dan
 - d. Hari upacara bulanan dan upacara lainnya berlaku untuk pagi yaitu jam 07.30 sampai dengan jam 08.30.
- (5) Setiap PNS wajib mengikuti apel atau mengikuti upacara hari – hari besar nasional/daerah, kegiatan pemerintahan dan kegiatan hari besar agama.
 - (6) Setiap PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pengurangan TPP karena tidak apel pagi.
 - (7) Jadwal waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual pada bulan Puasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (8) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menggunakan shift kerja, dapat melakukan penyimpangan waktu kepada PNS tertentu untuk melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual.
- (2) Penyimpangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan lama Hari Kerja setiap hari.
- (3) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual setiap Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 38

- (1) PNS yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik atau menandatangani daftar hadir karena melaksanakan tugas khusus dinyatakan hadir apabila melampirkan bukti penugasan.
- (2) Tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan perjalanan dinas dalam dan luar Kabupaten;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan;
 - c. mengikuti seminar, workshop dan sosialisasi kedinasan.

BAB VII

PERHITUNGAN DATA DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Hasil disiplin kerja dan produktivitas kerja setiap bulan dilakukan rekapitulasi oleh masing-masing:
 - a. Bagian Umum pada Sekretariat Daerah untuk Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati; dan
 - b. Sub Bagian yang membidangi tugas kepegawaian untuk Perangkat Daerah.

- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari data rekapitulasi setiap Perangkat Daerah berdasarkan data dukungan hasil disiplin kerja dan produktivitas kerja.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari data rekapitulasi setiap Bagian berdasarkan dukungan data hasil disiplin kerja dan produktivitas kerja.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh masing-masing:
 - a. Sekretaris Daerah untuk hasil perilaku kerja dan prestasi kerja dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;
 - b. Kepala Perangkat Daerah untuk hasil perilaku kerja dan prestasi kerja pada Perangkat Daerah;
 - c. Kepala Bagian untuk hasil perilaku kerja dan prestasi kerja pada Bagian Sekretariat Daerah; dan
 - d. Direktur untuk hasil perilaku kerja dan prestasi kerja pada Rumah Sakit.
- (5) Format rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Bagian Umum atau Pejabat Penanggung Jawab membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Bagian berdasarkan data rekapitulasi yang telah disahkan.
- (2) Sub Bagian yang membidangi tugas keuangan atau Pejabat Penanggung Jawab pada Perangkat Daerah membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP bagi Perangkat Daerah berdasarkan data rekapitulasi.
- (3) Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana TPP berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerbitan Surat Perintah Pembayaran Dana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulan.

Pasal 41

- (1) TPP dibayarkan 12 (dua belas) kali setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal lima belas, kecuali untuk bulan Desember diajukan dalam bulan berjalan.

- (3) Tata cara permintaan pembayaran ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pejabat Penanggung Jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilampiri dengan:
 1. daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab;
 2. daftar rekapitulasi kehadiran meliputi :
 - a) kehadiran apel;
 - b) Kehadiran melaksanakan tugas;
 - c) kehadiran upacara;
 - d) kehadiran kegiatan keagamaan dan pemerintahan lainnya; dan
 - e) daftar rekapitulasi laporan produktivitas kerja.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Selain pemberian sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS juga dikenakan sanksi berupa pemotongan TPP menurut Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

PNS yang telah memperoleh TPP dapat menerima honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tata cara penilaian dan perhitungan TPP tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

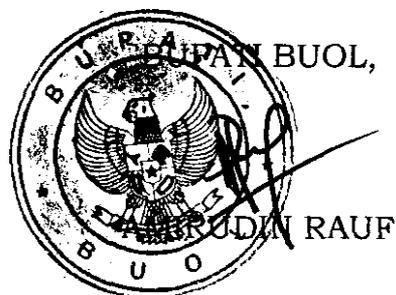
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 12 Februari 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2020 NOMOR .1.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BUOL
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BESARAN NILAI
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) ASN TAHUN 2020

| NO | JABATAN | KELAS | BESARAN TPP/BULAN (Rp.) |
|------------------------------|----------------------------|-------|----------------------------|
| 1. SEKRETARIAT DAERAH | | | |
| | Sekretaris Daerah | 15 | 10,445,025 |
| | Staf Ahli | 13 | 4,906,471 |
| | Asisten | 14 | 5,963,732 |
| | Kepala Bagian | 12 | 4,636,527 |
| | Kepala Sub. Bagian | 8 | 2,683,122 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| 2. SEKRETARIAT DPRD | | | |
| | Sekretaris DPRD | 14 | 5,715,244 |
| | Kepala Bagian | 11 | 4,136,094 |
| | Kepala Sub. Bagian | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| 3. INSPEKTORAT | | | |
| | Inspektur Inspektorat | 14 | 6,212,221 |
| | Sekretaris Inspektorat | 12 | 4,458,199 |
| | Inspektur Pembantu | 11 | 4,136,094 |
| | Kepala Sub. Bagian | 8 | 2,683,122 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| | Rumpun JFT | | - |
| | Auditor Pelaksana | 6 | 1,477,581 |
| | Auditor Pelaksana Lanjutan | 7 | 1,996,058 |

| | | | |
|--|----------------------------------|----|-----------|
| | Auditor Penyelia | 8 | 2,431,580 |
| | Auditor Pertama | 8 | 2,515,427 |
| | Auditor Muda | 9 | 2,712,368 |
| | Auditor Madya | 11 | 4,136,094 |
| | Auditor Utama | 13 | 5,352,513 |
| | Auditor Kepegawaian Pertama | 8 | 2,515,427 |
| | Auditor Kepegawaian Muda | 9 | 2,712,368 |
| | Auditor Kepegawaian Madya | 11 | 3,860,354 |
| 4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL | | | |
| | Kepala Dinas | 14 | 5,715,244 |
| | Sekretaris Dinas | 12 | 4,137,208 |
| | Kepala Bidang | 11 | 3,998,224 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| 5. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | |
| | Kepala Dinas | 14 | 5,715,244 |
| | Sekretaris Dinas | 12 | 4,137,208 |
| | Kepala Bidang | 11 | 3,998,224 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| 6. DINAS PERHUBUNGAN | | | |
| | Kepala Dinas | 14 | 5,715,244 |
| | Sekretaris Dinas | 12 | 4,137,208 |
| | Kepala Bidang | 11 | 3,998,224 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| 7. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KP | | | |
| | Kepala Dinas | 14 | 5,715,244 |
| | Sekretaris Dinas | 12 | 4,137,208 |

| | | | |
|---|---------------------------------------|----|-----------|
| | Kepala Bidang | 11 | 3,998,224 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| 8. DINAS SOSIAL | | | |
| | Kepala Dinas | 14 | 5,715,244 |
| | Sekretaris Dinas | 12 | 4,137,208 |
| | Kepala Bidang | 11 | 3,998,224 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| 9. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | |
| | Kepala Dinas | 14 | 5,715,244 |
| | Sekretaris Dinas | 12 | 4,137,208 |
| | Kepala Bidang | 11 | 3,998,224 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| 10. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | | | |
| | Kepala Dinas | 14 | 5,715,244 |
| | Sekretaris Dinas | 12 | 4,137,208 |
| | Kepala Bidang | 11 | 3,998,224 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| | Rumpun JFT | | - |
| | Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula | 5 | 1,178,681 |
| | Penyuluh Pertanian Pelaksana | 6 | 1,541,823 |
| | Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan | 7 | 2,069,986 |
| | Penyuluh Pertanian Penyelia | 8 | 2,515,427 |
| | Penyuluh Pertanian Pertama | 8 | 2,599,275 |

| | | | |
|---|------------------------------------|----|-----------|
| | Penyuluh Pertanian Muda | 9 | 2,712,368 |
| | Penyuluh Pertanian Madya | 11 | 3,998,224 |
| | Penyuluh Pertanian Utama | 13 | 5,352,513 |
| | UPT Pembibitan Ternak | | - |
| | Kepala UPTD | 8 | 2,599,275 |
| | Kepala sub bagian. | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| 11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | Kepala Dinas | 14 | 5,715,244 |
| | Sekretaris Dinas | 12 | 4,137,208 |
| | Kepala Bidang | 11 | 3,998,224 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| | UPT Laboratorium Lingkungan Daerah | | - |
| | Kepala UPTD | 8 | 2,599,275 |
| | Kepala sub bagian. | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| 12. DINAS PERIKANAN | | | |
| | Kepala Dinas | 14 | 5,715,244 |
| | Sekretaris Dinas | 12 | 4,137,208 |
| | Kepala Bidang | 11 | 3,998,224 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| 13. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |
| | Kepala Dinas | 14 | 5,715,244 |
| | Sekretaris Dinas | 12 | 4,137,208 |
| | Kepala Bidang | 11 | 3,998,224 |

| | | | |
|--|----------------------------------|----|-----------|
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| 14. DINAS KOPERASI,UKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | |
| | Kepala Dinas | 14 | 5,715,244 |
| | Sekretaris Dinas | 12 | 4,137,208 |
| | Kepala Bidang | 11 | 3,998,224 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| | UPT Pengelolaan Pasar | | - |
| | Kepala UPTD | 8 | 2,599,275 |
| | Kepala sub bagian. | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| 15. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU | | | |
| | Kepala Dinas | 14 | 5,715,244 |
| | Sekretaris Dinas | 12 | 4,137,208 |
| | Kepala Bidang | 11 | 3,998,224 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| 16. DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | | | |
| | Kepala Dinas | 14 | 5,715,244 |
| | Sekretaris Dinas | 12 | 4,137,208 |
| | Kepala Bidang | 11 | 3,998,224 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |

| | | | |
|--|----------------------------------|----|-----------|
| 17. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | |
| | Kepala Dinas | 14 | 5,715,244 |
| | Sekretaris Dinas | 12 | 4,137,208 |
| | Kepala Bidang | 11 | 3,998,224 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| 18. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | |
| | Kepala Satuan | 14 | 5,715,244 |
| | Sekretaris | 12 | 4,137,208 |
| | Kepala Bidang | 11 | 3,998,224 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| 19. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| | Kepala Dinas | 14 | 5,715,244 |
| | Sekretaris Dinas | 12 | 4,137,208 |
| | Kepala Bidang | 11 | 3,998,224 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| 20. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | | | |
| | Kepala Dinas | 14 | 5,715,244 |
| | Sekretaris Dinas | 12 | 4,137,208 |
| | Kepala Bidang | 11 | 3,998,224 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| RUMAH SAKIT DAERAH | | | |
| | Kepala Bagian/Bidang | 11 | 3,998,224 |

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|----|-----------|
| | Kepala Sub. bagian/sub. Bidang | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| PUSKESMAS | | | |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| | Rumpun JFT | | - |
| | Administrator Kesehatan Madya | 11 | 3,777,632 |
| | Administrator Kesehatan Muda | 9 | 2,649,775 |
| | Administrator Kesehatan Pertama | 8 | 2,515,427 |
| | Apoteker Madya | 11 | 3,805,206 |
| | Apoteker Muda | 9 | 2,670,639 |
| | Apoteker Pertama | 8 | 2,532,197 |
| | Asisten Apoteker Penyelia | 8 | 2,431,580 |
| | Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan | 7 | 1,996,058 |
| | Asisten Apoteker Pelaksana | 6 | 1,541,823 |
| | Asisten Apoteker Pelaksana Pemula | 5 | 1,071,528 |
| | Bidan Madya | 11 | 3,777,632 |
| | Bidan Muda | 9 | 2,649,775 |
| | Bidan Pertama | 8 | 2,515,427 |
| | Bidan Penyelia | 8 | 2,431,580 |
| | Bidan Pelaksana Lanjutan | 7 | 1,996,058 |
| | Bidan Pelaksana | 6 | 1,477,581 |
| | Bidan Pelaksana Pemula | 5 | 1,071,528 |
| | Dokter Pendidik Klinis Madya | 12 | 4,351,202 |
| | Dokter Pendidik Klinis Muda | 10 | 3,261,975 |
| | Dokter Pendidik Klinis Pertama | 9 | 2,670,639 |
| | Dokter Gigi Utama | 14 | 5,516,452 |
| | Dokter Gigi Madya | 12 | 4,351,202 |
| | Dokter Gigi Muda | 10 | 3,261,975 |
| | Dokter Gigi Pertama | 9 | 2,670,639 |
| | Dokter Utama (Khusus Spesialist) | 15 | 6,528,140 |
| | Dokter Utama | 14 | 5,516,452 |
| | Dokter Madya (Khusus Spesialist) | 13 | 4,817,262 |

| | | |
|--|----|-----------|
| Dokter Madya | 12 | 4,351,202 |
| Dokter Muda (Khusus Spesialist) | 12 | 3,805,206 |
| Dokter Muda | 12 | 3,261,975 |
| Dokter Pertama | 9 | 2,670,639 |
| Epidemiolog Kesehatan Madya | 11 | 3,777,632 |
| Epidemiolog Kesehatan Muda | 9 | 3,046,198 |
| Epidemiolog Kesehatan Pertama | 8 | 2,515,427 |
| Epidemiolog Kesehatan Penyelia | 8 | 2,398,041 |
| Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan | 7 | 1,996,058 |
| Epidemiolog Kesehatan Pelaksana | 6 | 1,477,581 |
| Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula | 5 | 1,071,528 |
| Entimolog Kesehatan Madya | 11 | 3,777,632 |
| Entimolog Kesehatan Muda | 9 | 3,046,198 |
| Entimolog Kesehatan Pertama | 8 | 2,515,427 |
| Entimolog Kesehatan Penyelia | 8 | 2,398,041 |
| Entimolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan | 7 | 1,996,058 |
| Entimolog Kesehatan Pelaksana | 6 | 1,477,581 |
| Entimolog Kesehatan Pelaksana Pemula | 5 | 1,071,528 |
| Fisioterapis Madya | 11 | 3,777,632 |
| Fisioterapis Muda | 9 | 3,046,198 |
| Fisioterapis Pertama | 8 | 2,515,427 |
| Fisioterapis Penyelia | 8 | 2,398,041 |
| Fisioterapis Pelaksana Lanjutan | 7 | 1,996,058 |
| Fisioterapis Pelaksana | 6 | 1,477,581 |
| Nutrisisionis Madya | 11 | 3,777,632 |
| Nutrisisionis Muda | 9 | 3,046,198 |
| Nutrisisionis Pertama | 8 | 2,515,427 |
| Nutrisisionis Penyelia | 8 | 2,398,041 |
| Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan | 7 | 1,996,058 |
| Nutrisisionis Pelaksana | 6 | 1,477,581 |
| Okupasi Terapis Penyelia | 8 | 2,398,041 |
| Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan | 7 | 1,996,058 |
| Okupasi Terapis Pelaksana | 6 | 1,477,581 |
| Ortosis Protetis Penyelia | 8 | 2,398,041 |
| Ortosis Protetis Pelaksana Lanjutan | 7 | 1,996,058 |
| Ortosis Protetis Pelaksana | 6 | 1,477,581 |

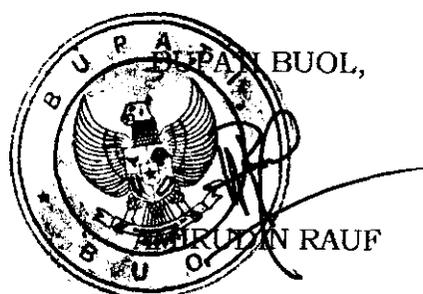
| | | |
|---|----|-----------|
| Pengawas Farmasi dan Makanan Madya | 11 | 3,777,632 |
| Pengawas Farmasi dan Makanan Muda | 9 | 2,649,775 |
| Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama | 8 | 2,498,658 |
| Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia | 8 | 2,398,041 |
| Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana Lanjutan | 7 | 1,996,058 |
| Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana | 6 | 1,477,581 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya | 11 | 3,805,206 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda | 9 | 2,712,368 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | 8 | 2,565,736 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia | 8 | 2,465,119 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan | 7 | 2,025,629 |
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana | 6 | 1,477,581 |
| Perawat Gigi Penyelia | 8 | 2,465,119 |
| Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan | 7 | 2,025,629 |
| Perawat Gigi Pelaksana | 6 | 1,477,581 |
| Perawat Madya | 11 | 3,832,780 |
| Perawat Muda | 9 | 2,712,368 |
| Perawat Pertama | 8 | 2,599,275 |
| Perawat Penyelia | 8 | 2,465,119 |
| Perawat Pelaksana Lanjutan | 7 | 2,069,986 |
| Perawat Pelaksana | 6 | 1,503,278 |
| Perawat Pelaksana Pemula | 5 | 1,071,528 |
| Perekam Medis Penyelia | 8 | 2,465,119 |
| Perekam Medis Pelaksana Lanjutan | 7 | 2,025,629 |
| Perekam Medis Pelaksana | 6 | 1,477,581 |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Madya | 11 | 3,777,632 |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Muda | 9 | 2,649,775 |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama | 8 | 2,515,427 |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia | 8 | 2,398,041 |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan | 7 | 1,996,058 |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | 6 | 1,477,581 |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula | 5 | 1,071,528 |
| Psikolog Klinis Madya | 11 | 3,832,780 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----|-----------|
| | Psikolog Klinis Muda | 9 | 2,712,368 |
| | Psikolog Klinis Pertama | 8 | 2,599,275 |
| | Radiografer Medis Penyelia | 8 | 2,465,119 |
| | Radiografer Pelaksana Lanjutan | 7 | 2,025,629 |
| | Radiografer Pelaksana | 6 | 1,477,581 |
| | Tehnisi Elektromedis Penyelia | 8 | 2,465,119 |
| | Tehnisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan | 7 | 2,025,629 |
| | Tehnisi Elektromedis Pelaksana | 6 | 1,477,581 |
| | Tehnisi Gigi Penyelia | 8 | 2,465,119 |
| | Tehnisi Gigi Pelaksana Lanjutan | 7 | 2,025,629 |
| | Tehnisi Gigi Pelaksana | 6 | 1,477,581 |
| | Tehnisi Transfusi Darah Penyelia | 8 | 2,465,119 |
| | Tehnisi Transfusi Darah Pelaksana Lanjutan | 7 | 2,025,629 |
| | Tehnisi Transfusi Darah Pelaksana | 6 | 1,477,581 |
| | Tehnisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula | 5 | 1,071,528 |
| | Sanitarian Madya | 11 | 3,805,206 |
| | Sanitarian Muda | 9 | 2,712,368 |
| | Sanitarian Pertama | 8 | 2,599,275 |
| | Sanitarian Penyelia | 8 | 2,465,119 |
| | Sanitarian Pelaksana Lanjutan | 7 | 1,996,058 |
| | Sanitarian Pelaksana | 6 | 1,477,581 |
| | Sanitarian Pelaksana Pemula | 5 | 1,071,528 |
| 21. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | - |
| | Kepala Dinas | 14 | 5,715,244 |
| | Sekretaris | 12 | 4,137,208 |
| | Kepala Bidang | 11 | 3,998,224 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR | | | - |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| | Rumpun JFT | | - |
| | Pamong Belajar Pertama | 8 | 2,515,427 |

| | | | |
|--|--|----|-----------|
| | Pamong Belajar Muda | 9 | 2,649,775 |
| | Pamong Belajar Madya | 11 | 3,777,632 |
| | Pamong Belajar Penyelia | 8 | 2,431,580 |
| | Pamong Belajar Pelaksana Lanjutan | 7 | 1,996,058 |
| | Pamong Belajar Pelaksana | 6 | 1,541,823 |
| | PELAKSANA SEKOLAH | | - |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| 22. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | - |
| | Kepala Badan | 14 | 5,963,732 |
| | Sekretaris | 12 | 4,279,871 |
| | Kepala Bidang | 11 | 4,136,094 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Sub. Bidang | 8 | 2,683,122 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| 23. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | - |
| | Kepala Badan | 14 | 5,715,244 |
| | Sekretaris | 12 | 4,137,208 |
| | Kepala Bidang | 11 | 3,998,224 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Sub. Bidang | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| 24. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | - |
| | Kepala Badan | 14 | 5,715,244 |
| | Sekretaris | 11 | 3,998,224 |
| | Kepala Bidang | 11 | 3,998,224 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Sub. Bidang | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| 25. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | - |
| | Kepala Badan | 14 | 5,715,244 |

| | | | |
|--|--|----|-----------|
| | Sekretaris | 12 | 4,137,208 |
| | Kepala Bidang | 11 | 3,998,224 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Sub. Bidang | 8 | 2,599,275 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| 26. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | | | - |
| | Kepala Badan | 14 | 5,963,732 |
| | Sekretaris | 12 | 4,279,871 |
| | Kepala Bidang | 11 | 4,136,094 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Sub. Bidang | 8 | 2,683,122 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| | Rumpun JFT | | - |
| | Analisis Kepegawaian Madya | 11 | 3,860,354 |
| | Analisis Kepegawaian Muda | 9 | 2,712,368 |
| | Analisis Kepegawaian Pertama | 8 | 2,515,427 |
| | Asesor SDM Aparatur Madya | 12 | 4,279,871 |
| | Asesor SDM Aparatur Muda | 10 | 3,477,841 |
| | Asesor SDM Aparatur Pertama | 8 | 2,515,427 |
| 27. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | - |
| | Kepala Badan | 14 | 5,963,732 |
| | Sekretaris | 12 | 4,279,871 |
| | Kepala Bidang | 11 | 4,136,094 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Sub. Bidang | 8 | 2,683,122 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| 28. KECAMATAN | | | - |
| | Camat | 12 | 4,529,530 |
| | Sekretaris | 11 | 3,998,224 |
| | Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi | 8 | 2,582,505 |

| | | | |
|--|-------------------|---|-----------|
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |
| | KELURAHAN | | - |
| | Lurah | 9 | 3,025,334 |
| | Sekretaris | 8 | 2,582,505 |
| | Kepala Seksi | 8 | 2,532,197 |
| | Pelaksana Kelas 6 | 6 | 1,349,096 |
| | Pelaksana Kelas 5 | 5 | 964,375 |
| | Pelaksana Kelas 3 | 3 | 682,149 |



LAMPIRAN II:
 PERATURAN BUPATI NOMOR 1. TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS

A. FORMAT DAFTAR HADIR HARIAN

Bulan :
 Hari, Tanggal :

| No. | NAMA / NIP. | Pangkat/ Gol. Ruang | Jabatan | Masuk | | Pulang | | KET. |
|-----|-------------------------|---------------------|---------|-------|-------|--------|-------|------|
| | | | | Jam | Paraf | Jam | Paraf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nama NIP. | | | | | | | |
| 2 | Nama NIP. | | | | | | | |
| 3 | Nama NIP. | | | | | | | |
| 4 | Nama NIP. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | |

B. FORMAT DAFTAR HADIR UPACARA*) / KEGIATAN KEAGAMAAN **) / KEGIATAN PEMERINTAHAN*)**

Bulan :
 Hari, Tanggal :

| No. | NAMA / NIP. | Pangkat/ Gol. Ruang | Jabatan | Paraf | KETERANGAN |
|-----|-------------------------|---------------------|---------|-------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Nama NIP. | | | | |
| 2 | Nama NIP. | | | | |
| 3 | Nama NIP. | | | | |
| 4 | Nama NIP. | | | | |
| dst | | | | | |

Keterangan:

Absen dibuat masing-masing kegiatan.

- *) Upacara hari-hari besar Nasional
- **) Kegiatan pengajian dan memperingati hari besar keagamaan
- ***) Kegiatan Pemerintahan sesuai undangan

Buol, 20.....
 Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja

Nama

Nip.....

BUPATI BUOL

T t d

AMIRUDIN RAUF

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS

LAPORAN DAN PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA

Nama/Nip :
Jabatan :
Nama Atasan Langsung :
Jabatan Atasan Langsung :
Hari/Tanggal :

| No. | Waktu | URAIAN PEKERJAAN | NILAI PRODUKTIVITAS KERJA | KETERANGAN |
|-----------------------|-------|------------------|---------------------------|------------|
| | - | | | |
| | - | | | |
| | - | | | |
| | - | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| NILAI RATA-RATA | | | | |
| PERSENTASE PEMOTONGAN | | | | |

Atasan Penilai,

Yang Membuat Laporan,

Nama _____
NIP.

Nama _____
NIP.

Keterangan:

| | |
|-----------|--|
| Kolom 1 = | Cukup jelas. |
| Kolom 2 = | Diisi waktu pelaksanaan produktivitas kerja setiap hari kinerja. |
| Kolom 3 = | Diisi dengan uraian-uraian kegiatan produktivitas kerja. |
| Kolom 4 = | Diisi dengan nilai hasil produktivitas kerja oleh atasan penilai sesuai dengan kategori nilai 75 s.d 100 dipotong 0%, Nilai 50 s.d 74 dipotong 0,7%, Nilai 26 s.d 49 dipotong 1,1%, dan Nilai <25 dipotong 1,6%. |

BUPATI BUOL,

T t d

AMIRUDIN RAUF

